



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

**TRIWULAN II  
TAHUN 2021**

**SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, Juli 2021**

---

**NOTA DINAS**  
**NOMOR: 701 /IJ-IND.1/PR/VII/2021**

Kepada Yth : Inspektur Jenderal  
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Hal : Laporan PP39 Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan II tahun 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : Juli 2021

---

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan PP 39) Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan II (April-Juni) 2021.

Realisasi keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada triwulan II tahun 2021 (April-Juni) 2021 mencapai Rp8.654.948.025 atau sebesar 29,03% dari pagu anggaran sebesar Rp29.811.257.000,- dengan realisasi fisik sebesar 14,09 %. Sehingga realisasi keuangan di triwulan II (Januari-Juni) 2021 mencapai Rp15.552.754.986 atau sebesar 41,66% dari pagu anggaran dengan realisasi fisik sebesar 33,71%.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal



t t d

Tembusan:  
1. Kepala Bagian Umum

Lilie Widodo



## **KATA PENGANTAR**

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Triwulan II Tahun 2021 juga sebagai informasi atas capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal selama Triwulan II, untuk pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Juli 2021

**SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL**



**LILIEK WIDODO**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program .....	2
C. Struktur Organisasi.....	4
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN .....	5
A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021 .....	5
B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan .....	9
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN .....	19
A. Hasil Yang Telah Dicapai .....	19
B. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran .....	19
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.....	37
D. Langkah Tindak Lanjut .....	37
BAB IV. PENUTUP .....	39
LAMPIRAN .....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Output Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 .....	5
Tabel 2 Alokasi anggaran dan aktivitas Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 .....	6
Tabel 3 Informasi kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 ..	11
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021.	16
Tabel 5 Target Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	18
Tabel 6 Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Tahun 2021 .....	29
Tabel 7 Realisasi kegiatan/output Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	35
Tabel 8 Kegiatan Fisik & Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2021 .....	36

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Untuk kelancaran tugas-tugas pengawasan tersebut diperlukan adanya dukungan teknis, administrasi, dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
3. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;

4. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan
5. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana Inspektorat Jenderal;
7. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik Negara, dan tata usaha milik Inspektorat Jenderal;
- b. Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

## **B. Latar Belakang Kegiatan/Program**

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di



mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja) dan penjamin mutu kegiatan unit kerja.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Inspektorat Jenderal diarahkan untuk :

1. Menyusun program pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
5. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.

### **C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan satu dari lima Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan susunan organisasi terdiri dari :

- 1. Bagian Umum** mempunyai tugas Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional**

## BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

### A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah "Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal", dengan rincian kegiatan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1 Output Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1.	6036.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	-
2.	6036.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	-
3.	6036.EAD	Layanan Sarana Internal	1 Unit	-
4.	6036.EAK	Layanan Pengawasan Internal	2 Laporan	-
5.	6036.EAL	Layanan Monitoring dan evaluasi Internal	13 Laporan	-
6.	6036.QEC	Bantuan Produk	200 Paket	-

Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 mempunyai 6 (enam) output (keluaran) dengan anggaran sebesar Rp29.811.257.000,-. Untuk menghasilkan output tersebut, telah dialokasikan anggaran melalui kegiatan-kegiatan (aktivitas) sebagai berikut :

Tabel 2 Alokasi anggaran dan aktivitas Sekretariat Inspektorat Jenderal  
Tahun 2021

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
6036	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal		29.811.257.000
6036.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	22.794.871.000
6036.EAA.001	Layanan Perkantoran Inspektorat Jenderal		22.794.871.000
001	Gaji dan Tunjangan		17.467.091.000
A	Pembayaran gaji dan tunjangan		17.467.091.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		5.327.780.000
A	Honorarium Operasional		1.918.357.000
B	Persediaan dan Perlengkapan Kantor		406.575.000
C	Biaya langganan dan operasional perkantoran		1.243.830.000
D	Koordinasi dan layanan pimpinan		877.188.000
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor		811.830.000
6036.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	4.519.854.000
6036.EAB.001	Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal		4.519.854.000
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		772.402.000
A	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2022		242.780.000
B	Penyusunan dan Revisi RKAKL Inspektorat Jenderal		116.420.000
C	Fasilitasi Reviu RKAKL		52.120.000
D	Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal		9.100.000
E	BIMBINGAN DAN PENGAWASAN ASPEK PROGRAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		352.000.000
053	Pengelolaan Keuangan		382.370.000
A	Pelayanan Perbendaharaan		115.240.000
B	Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN		98.600.000
C	Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN		11.890.000
D	Penyusunan RKBMN		1.560.000
E	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan		5.080.000
F	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian		150.000.000
055	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal		629.582.000
A	Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum		171.782.000
B	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal		58.200.000
C	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja		27.400.000
D	Internalisasi Penerapan Kode Etik Auditor		16.600.000
E	Evaluasi Kelembagaan Internal dan Organisasi Inspektorat Jenderal		18.100.000

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
F	Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Perindustrian		337.500.000
056	Pengelolaan Kepegawaian		734.128.000
A	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Jenderal		201.428.000
B	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat Jenderal		299.950.000
D	Pelatihan di Kantor Sendiri (In House Training)		29.250.000
E	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor		31.000.000
F	Penyusunan Peta Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		27.400.000
G	Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat Pengembangan Kompetensi Pegawai Itjen		13.000.000
I	Pengembangan kompetensi jabatan fungsional auditor Itjen		107.700.000
J	Pemantauan dan Penilaian Kinerja Individu Pegawai Itjen		9.400.000
K	Fasilitasi Bebas Masa Tugas menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal		15.000.000
057	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		646.096.000
A	Koordinasi dalam rangka penataan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat Jenderal		81.980.000
B	Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif		14.000.000
C	Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan		505.956.000
D	Pengembangan Informasi Pengawasan		44.160.000
059	Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokoler		163.536.000
A	Pemutakhiran data dan Informasi		11.036.000
B	Penerbitan Masalah Solusi		152.500.000
060	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi		1.191.740.000
A	Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian		23.016.000
B	Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal		16.050.000
C	Penilaian Index Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian		493.928.000
D	Forum Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB)		120.650.000
E	Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian		270.816.000
F	Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan		267.280.000
6036.EAD	Layanan Sarana Internal	1 Unit	590.000.000
6036.EAD.01	Layanan Sarana Internal Inspektorat Jenderal		590.000.000
052	Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi		590.000.000

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
A	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		590.000.000
6036.EAK	Layanan Pengawasan Internal	2 Laporan	557.932.000
6036.EAK.001	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal		557.932.000
051	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal		557.932.000
A	Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran data tindak lanjut		183.060.000
B	Temu Teknis Penyuluhan/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		150.920.000
C	Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal		29.240.000
D	Forum Rakorwas Koordinasi Data Hasil Pengawasan		194.712.000
6036.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	13 Laporan	748.600.000
6036.EAL.001	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Inspektorat Jenderal		748.600.000
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		348.600.000
A	Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja		202.840.000
B	Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan, Reviu Perkin		1.100.000
C	Penyusunan dan Reviu LAKIN Itjen dan Set Itjen		1.100.000
D	Fasilitasi Penilaian SAKIP Eselon II Itjen		1.760.000
E	Reviu Renstra		880.000
F	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal		140.980.000
052	Penyusunan Laporan		399.940.000
A	Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan		132.280.000
B	Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri		109.200.000
C	Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik		3.960.000
D	Penyusunan Laporan APIP		3.400.000
E	Fasilitasi Penilaian SAKIP Eselon I		1.100.000
F	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut/Evaluasi Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian		150.000.000
6036.QEC	Bantuan Produk	2 Paket	600.000.000
6036.QEC.001	Bantuan Masker dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM Mikro		600.000.000
A	Pengadaan masker dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM Mikro		600.000.000

## **B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan**

Sasaran program/ kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
3. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif;
4. Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien;
5. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan aktivitas yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran;
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi;
3. Pengelolaan Data dan Informasi;
4. Pengelolaan Keuangan;
5. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal;
6. Pengelolaan Kepegawaian;
7. Pelayanan Umum dan Perlengkapan;
8. Pelayanan Humas dan Protokoler;
9. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi;
10. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
11. Gaji dan Tunjangan;
12. Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Hubungan Sasaran dan Program serta aktivitas Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah disahkan dalam perjanjian kinerja dapat digambarkan melalui tabel berikut:



Tabel 3 Informasi kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
1.	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi (IKU)	91,5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal</li> <li>- Forum Rakorwas Koordinasi Data Hasil Pengawasan</li> <li>- Temu Teknis Penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> </ul>
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dan Informasi terkait terkait rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti</li> </ul>
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum</li> </ul>
		Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dan Informasi terkait temuan material berdasarkan pengawasan eksternal</li> </ul>
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Forum Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB)</li> <li>- Penilaian Mandiri satuan kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih</li> </ul>
		Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian Indeks Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian</li> </ul>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
3.	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring &amp; Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal;</li> </ul>
		Peningkatan level kapabilitas APIP (IACM) *)IKU	Level 3 IACM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian SAKIP Eselon I;</li> <li>- Penyusunan kebijakan pengawasan tahun 2022;</li> <li>- Peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal;</li> <li>- Peningkatan kerja sama SDM pegawai Inspektorat Jenderal JPT dan JFU (Team Building);</li> <li>- Penerbitan Majalah Solusi ;</li> <li>- Penilaian SAKIP Eselon I Inspektorat Jenderal;</li> <li>- Penilaian SAKIP eselon II Itjen;</li> <li>- Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja</li> <li>- Pengendalian Intern atas pelaporan Keuangan</li> <li>- Pembinaan dan pengawasan aspek kepegawaian dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Penyusunan Laporan Analisis dan evaluasi hasil Pengawasan Tematik</li> <li>- Analisis dan evaluasi hasil pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industry</li> <li>- Penyusunan dan reviu LAKIP Itjen dan Set Itjen</li> </ul>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi analisis dan evaluasi pelaporan hasil pengawasan</li> <li>- Reviu Renstra</li> <li>- Penyusunan dan revisi RKAKL Inspektorat Jenderal</li> </ul>
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi</li> </ul>
4.	Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Informasi Pengawasan;</li> </ul>
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan program prioritas tahunan di lingkungan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Evaluasi kelembagaan internal organisasi Inspektorat Jenderal;</li> </ul>
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal;</li> <li>- Koordinasi penyusunan Perjanjian kinerja dan Rencana Kinerja;</li> <li>- Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan dan Reviu Perkin;</li> </ul>
		Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutakhiran Data dan Informasi</li> </ul>
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Peta pengembangan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal</li> <li>- Analisa Beban Kerja</li> </ul>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
				- Penyusunan pengembangan kompetensi di lingkungan Inspektorat Jenderal
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91%	- Evaluasi penilaian reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal - Aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian
5.	Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas	<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	- Pelatihan di Kantor Sendiri - Pemantauan dan Penilaian kinerja Individu pegawai Itjen; - Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional auditor; - Pemetaan Job Profiling jabatan fungsional umum pegawai ITJEN
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75%	- Penyusunan analisa kebutuhan diklat pengembangan kompetensi pegawai Itjen - Assesment kompetensi pegawai Itjen - Koordinasi pelaksanaan diklat dengan BPSDMI - Penilaian Angka Kredit - Evaluasi Prestasi Kinerja Pegawai
		Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	92%	- Fasilitasi pemantauan penerapan kode etik auditor; - Internalisasi penerapan kode etik auditor.
		Layanan Perkantoran	12 bulan layanan	- Penataan dan penghapusan arsip/dokumen pengawasan dari arsip inaktif; - Koordinasi dalam rangka penataan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
				ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat Jenderal; - Bimbingan dan pengawasan aspek keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian; - Pelayanan umum dan rapat kedinasan; - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN; - Bimbingan dan pengawasan aspek keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian; - Pelayanan Perbendaharaan; - Pemeliharaan sarana dan prasarana operasional kantor; - Koordinasi dan sinkronisasi administrasi keuangan dan BMN; - Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif; - Gaji dan tunjangan; - Koordinasi dan layanan pimpinan; - Honorarium dan Operasional - Biaya langganan dan operasional kantor; - Persediaan dan perlengkapan kantor; - Pembinaan dan pengawasan pimpinan; - Pengelolaan administrasi kepegawaian Inspektorat Jenderal; - Fasilitasi Reviu RKAKL; - Fasilitasi beban masa tugas menjelang pension PNS Inspektorat Jenderal.

➤ **Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2021 adalah :

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal *)IKU	2 laporan
		Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti *)IKU	4 laporan
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85 %
		Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	4 laporan
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71%
		Koordinasi Penilaian Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	1 kegiatan
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal *)IKU	Level 3
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan	Ketersediaan Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan	25%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Efisien	oleh auditor	
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55%
		Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%
		Ketersediaan data dan informasi pengawasan yang memadai	90%
		Komponen pengungkit penerapan RB di unit Itjen	91%
5.	Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas	Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%
		Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	75%
		Kepatuhan terhadap kode etik auditor dalam menjalankan tugas pengawasan	92%
		Terselenggaranya layanan perkantoran Inspektorat Jenderal	12 Bulan Layanan

\*) Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal dan *tagging* Sekretariat Inspektorat Jenderal

#### ➤ **Indikator Kinerja Kegiatan (Output)**

Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Layanan Perkantoran;
2. Tersedianya Layanan Perencanaan & penganggaran Internal;
3. Tersedianya Layanan Sarana Internal;
4. Tersedianya Layanan Pengawasan Internal;

5. Tersedianya Monitoring & Evaluasi Internal;
6. Bantuan Produk.

Tabel 5 Target Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>TW I</b>	<b>TW II</b>	<b>TW III</b>	<b>TW IV</b>
1	Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-	-	1 layanan
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	-	-	-	1 layanan
3	Layanan Sarana Internal	1 Unit	-	-	-	1 unit
4	Layanan Pengawasan Internal	2 Laporan	-	-	-	1 layanan
5	Layanan Monitoring dan evaluasi Internal	13 Laporan	4	2	2	5 laporan
6	Bantuan Produk	200 Paket	-	200 paket	-	-



### **BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN**

#### **A. Hasil Yang Telah Dicapai**

Realisasi keuangan triwulan II tahun 2021 (Januari-Juni) 2021 mencapai Rp15.552.754.986,- atau sebesar 41,66% dari pagu anggaran sebesar Rp29.811.257.000,- dengan realisasi fisik sebesar 33,71 %.

#### **B. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran**

Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2021 adalah Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal. Pada Triwulan II, meskipun beberapa kegiatan telah terlaksana, namun masih ada kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal masih bersifat persiapan dan tahap *on progress*. Hal ini mengakibatkan realisasi anggaran dan realisasi fisik masih belum memenuhi target yang ditetapkan sampai dengan Triwulan II. Selain itu masih dilakukannya revisi anggaran sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan ada yang baru dimulai maupun dalam tahap pelaksanaan

Sampai bulan Juni 2021, hampir semua kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal telah terlaksana sesuai dengan rencana. Kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah terlaksana pada triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan perencanaan anggaran tahun 2021 pada triwulan II dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
  - Update anggaran pada aplikasi SIRUP dan melakukan pengumuman paket pengadaan untuk satuan kerja Inspektorat Jenderal;
  - Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 dan

Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor : B/662/SJ-IND.1/PR/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal Revisi DIPA Dalam Rangka Penghematan Anggaran Tunjangan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021, Inspektorat Jenderal melakukan revisi anggaran dalam rangka pengalihan belanja tunjangan kinerja senilai Rp2.312.373.000,- yang akan dialokasikan untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin, penanganan pandemic COVID-19 dan dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

- Pada bulan Juni, telah dilakukan revisi pemotongan belanja pegawai (Tunjangan Kinerja) sebesar Rp2.312.373.000,-. Selain itu juga sedang dilakukan persiapan revisi anggaran terkait alokasi perangkat antisipasi penyebaran Covid (masih dalam tahap *draft*).
2. Kegiatan Penyusunan anggaran di triwulan II dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan konsep KAK dan RAB Tahun Anggaran 2022;
  - Inspektorat Jenderal dalam proses menyusun KAK dan RAB kegiatan Tahun 2022 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor 476/IJ-IND.1/PR/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Perubahan Penyampaian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang tertuang pada Surat Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 05920 /PP.04.03/Dt.8.2/B/05/2021 tanggal 21 Mei

2021 perihal Penyampaian Update terkait Penyusunan Rancangan Rencana Kerja K/L Tahun Anggaran 2022.

- Adapun Pagu Indikatif Inspektorat Jenderal pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 40.643.630.000, dengan rincian per Eselon II sebagai berikut :

Unit Eselon II	Anggaran
Inspektorat I	2.108.753.000
Inspektorat II	2.050.000.000
Inspektorat III	2.050.000.000
Inspektorat IV	2.050.000.000
Sekretariat ITJEN	32.384.877.000

- Perbaiki indikator pada aplikasi KRISNA Inspektorat Jenderal, dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang belum diinput.

### 3. Pengembangan SDM

Kegiatan pengelolaan kepegawaian dalam hal pengembangan SDM yang dilakukan selama Triwulan II (April-Juni 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi calon peserta diklat SPIP Batch I dengan BPKP;
- b. Menyusun laporan hasil penilaian Angka Kredit dan laporan monitoring hasil penilaian Angka Kredit JFA;
- c. Melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan membuat LHR penilaian SAKIP dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB pada tanggal 23 April 2021;
- d. Melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan membuat LHR penilaian PMPRB dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB pada tanggal 27 April 2021;

- e. Menyusun laporan penilaian DUPAK periode 1 Juli 2020 – 31 Desember 2020;
- f. Menyusun SK tim penilai Angka Kredit dan tim sekretaris penilaian Angka Kredit;
- g. Melaksanakan PKS penilaian ZI (PMPRBZI) dengan narasumber dari KemenPANRB;
- h. PKS Persamaan Persepsi Penilaian Zona Integritas tanggal 28 Juni 2021, narasumber Azka Rianto;
- i. Melaksanakan koordinasi terkait SK pensiun atas nama Kusmi Iriyanto;
- j. Melaksanakan koordinasi pegawai yang akan purna tugas 3 tahun kedepan untuk mengikuti pelatihan MPP;
- k. Melakukan koordinasi *update* pengisian SITARA (BP TAPERA);
- l. Melaksanakan PKS Overview Manajemen Resiko Indeks (MRI)/ SPIP New tanggal 31 Mei 2021, Narasumber Oktaviyanto Jimat W;
- m. PKS Mekanisme Perpindahan ke Dalam Jabatan Fungsional tanggal 29 Juni 2021 dengan narasumber Alfiah Rachmiantini (Biro OSDM);
- n. Melakukan Koordinasi dokumen Reformasi Birokrasi tentang Pakta Integritas di lingkungan Inspektorat Jenderal.

4. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal

Terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksterl, kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II (April-Juni) 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat dan Vertikal dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut atas Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, Dilaksanakan secara rutin,

baik melalui media surat menyurat maupun melalui virtual meeting. erdasarkan keterangan Satuan Kerja terkait, Sulitnya berkoordinasi dengan BPK-RI di luar penugasan Tim Pemantauan Tindak Lanjut (di luar Surat Tugas Tim PTL BPK-RI) karena penyelesaian tindak lanjut tidak hanya berupa dokumentasi/korespondensi surat-menyurat, akan tetapi perlu dilakukan komunikasi secara langsung;

- b. Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat dan Vertikal dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut atas Saldo Temuan Hasil Pengawasan Internal, Belum didukung oleh media yang memadai seperti aplikasi yang dapat menyimpan bukti dukung tindak lanjut agar lebih mudah menginventarisir dan lebih mudah dikoordinasikan dengan ketua tim auditor yang memeriksa;
- c. Pemutakhiran Tindak Lanjut pada satker Bandung dan Yogyakarta, selesai dilaksanakan pada tanggal 21-23 April 2021 dan 28-30 April 2021;
- d. Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (verifikasi tahap awal Subbagian PTLHP);
- e. Koordinasi dengan Ketua Tim Auditor dalam rangka Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Internal (Tahap Finalisasi), Koordinasi dilakukan 2 metode, baik secara langsung maupun media komunikasi seperti Whatsapp. Koordinasi dilakukan ketika Satker menindaklanjuti saldo temuan, belum disediakan media yang mempercepat proses verifikasi dokumen. Perlu dikembangkan sistem informasi yang mengakomodir hal tersebut;
- f. Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Penyelesaian Kerugian

Negara Periode Semester I Tahun 2021, dengan Tim Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI dan Seluruh Satker Kemenperin (sudah selesai) pelaksanaan tanggal 9-11 Juni 2021;

- g. Mengikuti Sosialisasi Peluncuran Strategi Nasional Aksi Pencegahan Korupsi tanggal 12-13 April 2021 Kegiatan ini melibatkan satuan kerja yang memiliki target yang harus dicapai dan dilaporkan per triwulan;
- h. Penilaian Mandiri PMPRB, telah dilaksanakan Panel I-III penilaian mandiri PMPRB
- i. Menginventarisir Data Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI per-Unit Kerja;
- j. Penyampaian dan Pengisian Hasil PMPRB Serta Mengunggah Dokumen Pendukung PMPRB ke dalam Aplikasi PMPRB Kementerian PAN dan RB Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Unit Pusat Area Penguatan Pengawasan. Pelaksanaan pada tanggal 17 Juni 2021;
- k. Koordinasi Pelaporan Pencapaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Periode B06, pelaksanaan pada tanggal 25 Juni 2021;
- l. Persiapan Survei Penilaian Integritas KPK (e-SPI) dan Penghitungan sampel dengan KPK (jumlah unit kerja yang dijadikan sampel sudah dihitung dan ditentukan);
- m. Koordinasi Penyediaan data SPI (Survei Penilaian Integritas), tanggal 16 Juni 2021;

5. Penyelesaian Evaluasi dan Pelaporan

- a. Penyampaian hasil dari penilaian SAKIP Eselon II Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan di bulan maret 2021, diperoleh dengan nilai sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	KOMPONEN					Nilai	Kategori
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	Pencapaian Sasaran/ Kinerja		
		30%	25%	15%	10%	20%		
1	Set Itjen	24.59	20.94	10.72	8.26	16.00	80.51	A
2	IR I	21.84	19.69	10.63	5.67	12.70	70.53	BB
3	IR II	23.74	20.31	12.37	7.05	16.09	79.56	BB
4	IR III	23.74	19.38	12.37	7.91	14.83	78.23	BB
5	IR IV	24.59	21.56	10.99	8.26	14.48	79.88	BB

- b. Reviu Renstra dan Reviu Capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2021;

- c. Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal setiap bulan (April-Juni) 2021.

6. Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan

Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan yang dilaksanakan selama Triwulan II (April-Juni 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian telah selesai dilaksanakan dengan nilai yang diperoleh Inspektorat Jenderal sebesar 80,10 dengan predikat A;
- b. Koordinasi pelaksanaan PMPZI (Persiapan Penilaian Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dari sisi Penyelesaian

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Pemeriksaan BPK-RI);

- c. Koordinasi Pelaporan Pencapaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Periode B06, pelaksanaan pada tanggal 25 Juni 2021;
- d. Persiapan Survei Penilaian Integritas KPK (e-SPI) dan Penghitungan sampel dengan KPK (jumlah unit kerja yang dijadikan sampel sudah dihitung dan ditentukan);

7. Pengelolaan Keuangan

Kegiatan yang dilakukan dalam hal pengelolaan keuangan selama Triwulan II (April-Juni 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan yang rutin setiap bulan;
- b. Pelaporan capaian output ke KPPN;
- c. Koordinasi terkait rekonsiliasi keuangan;
- d. Pelayanan perbendaharaan dalam rangka proses pengajuan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pencairan;
- e. Koordinasi dengan Biro Keuangan terkait Sinkronisasi administrasi keuangan dan BMN;
- f. Pencairan gaji ke-13.

8. Pelaksanaan PKPT s/d TW II

PKPT merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/ mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

PKPT yang dijadikan dasar dalam penyusunan evaluasi ini adalah PKPT awal yang diserahkan oleh masing-masing Inspektorat pada akhir tahun 2020.



Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengawasan pada masing-masing Inspektorat belum sesuai dengan perencanaan atau PKPT awal, masih terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan *timeframe* dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang tidak dicantumkan dalam PKPT.

Inspektorat I, pada bulan Januari 2021 merencanakan kegiatan reviu PIPK dan reviu LKBMN serta audit kinerja pada unit Sekretariat Jenderal pada bulan Januari sampai dengan Februari 2021. Pada pelaksanaannya, Inspektorat I hanya dapat melaksanakan reviu PIPK dan reviu LKBMN pada bulan Januari. Sementara audit kinerja pada unit Sekretariat Jenderal baru dilaksanakan pada bulan Maret 2021.

Kemudian, kegiatan evaluasi atas implementasi SAKIP baru dilaksanakan pada bulan April 2021. Menurut peraturan, kegiatan tersebut harus sudah selesai pada minggu kedua bulan Maret 2021.

PKPT Inspektorat I juga tidak memuat kegiatan pengawasan pelaksanaan hibah BMN. Padahal kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2021. Di bulan Mei Inspektorat I masih melaksanakan audit kinerja satker BPSDMI dan pelaksanaan PKS. Di bulan Juni, ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan PKPT yang disusun diawal tahun telah sesuai. Namun ada juga yang tidak sesuai dengan jadwal, yaitu Reviu RKA-KL Setjen dan BPSDMI

Kegiatan pengawasan Inspektorat II pada bulan Januari dan Maret 2021 telah sesuai dengan PKPT awal. Namun kegiatan audit program pada Direktorat Jenderal IKMA yang direncanakan pada bulan Februari-Maret 2021, belum dilaksanakan hingga bulan April 2021. Di bulan Mei Inspektorat II melaksanakan evaluasi Hibah BMN dan Audit Dekonsentrasi. Audit Dana dekonsentrasi dan evaluasi Hibah

BMN masih lanjut dilaksanakan di bulan Juni sesuai dengan PKPT yang telah dibuat



Kegiatan Inspektorat III pada bulan Januari dan Februari 2021 diisi dengan reuiu PIPK serta reuiu revisi anggaran satuan kerja cakupan tugas.





Kemudian, kegiatan reuiu LKBMN yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Maret 2021, telah dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Sementara pada bulan Maret melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP, audit kinerja serta reuiu PAPBJ. Ketiga kegiatan ini tidak direncanakan pada bulan Maret 2021. Di bulan Mei pelaksanaan kegiatan Inspektorat III masih pada audit kinerja BSKJI dan reuiu RKAKL satker cakupan tugas Inspektorat III. Audit kinerja pada satker cakupan tugas Inspektorat III masih lanjut dilaksanakan di bulan Juni 2021.

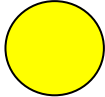
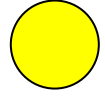
PKPT Inspektorat IV pada bulan Januari 2021 adalah melaksanakan survei pendahuluan serta reuiu PIPK pada satuan kerja cakupan tugas. Namun demikian pada pelaksanaannya melaksanakan kegiatan reuiu atas revisi anggaran serta pendapangan bantuan mesin pada Ditjen IKFT.






Evaluasi atas implementasi SAKIP yang direncanakan dilaksanakan pada bulan April 2021, telah dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Pada bulan April 2021, Inspektorat IV melaksanakan audit kinerja pada Ditjen Agro, penyelesaian hibah BMN serta audit kegiatan pameran Hannover Messe. Di Bulan Mei, masih dilakukan audit IKFT dan beberapa kegiatan terkait persiapan kegiatan IKFT. Audit kinerja IKFT dan KPAII masih lanjut dilaksanakan di bulan Juni ditambah dengan penilaian BMN Industri Agro



Tabel 6 Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Tahun 2021



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW II	Capaian TW II	Keterangan
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut</li> <li>- Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat dan Vertikal dalam rangka Penyelesaian TL atas Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan hasil pengawasan internal;</li> <li>- Follow Up permintaan dokumen pemeriksaan BPK</li> <li>- Pelaksanaan Revaluasi BMN sampai tindak lanjutnya</li> <li>- tindak lanjut saldo dekon dan pemutakhirannya</li> <li>- Pembahasan tindak lanjut audit kinerja BPK</li> <li>- Menginventarisir Data Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI per-Unit Kerja</li> <li>- Rekomendasi hasil pengawasan internal s/d 27 Juni 2021 sebesar 37% dari 363 total rekomendasi</li> </ul>	
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian;</li> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan.</li> </ul>	<p>Penanganan pengaduan masyarakat selama periode Caturwulan I 2021 (Januari-April) 2021 telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 93 pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat dilakukan secara online dan bersifat tidak berkadar pengawasan. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti dan telah disampaikan seluruhnya pada unit yang wajib menjawab. Sedangkan pengaduan yang sifatnya umum dan pengaduan lainnya telah langsung dijawab sesuai ketentuan.</p>	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW II	Capaian TW II	Keterangan
		Maksimum Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL	- Audit kinerja masing-masing Inspektorat berjalan sesuai dengan PKPT yang telah disusun - Reviu RKA-KL dilaksanakan di Triwulan III	
		Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawalan kegiatan berisiko tinggi.	- Kegiatan Audit maupun reviu LK-BMN yang dilaksanakan di TW II oleh masing-masing Inspektorat sebagaimana besar sesuai dengan PKPT yang telah direncanakan di awal tahun - Pendampingan/pengawalan kegiatan berisiko tinggi telah dilaksanakan oleh pimpinan di TW II	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB area penguatan pengawasan	- Forum komunikasi PMPRB - Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	- Penilaian Mandiri PMPRB, telah dilaksanakan Panel I-III penilaian mandiri PMPRB; - Penyampaian dan Pengisian Hasil PMPRB Serta Mengunggah Dokumen Pendukung PMPRB ke dalam Aplikasi PMPRB Kementerian PAN dan RB Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Unit Pusat Area Penguatan Pengawasan. Pelaksanaan pada tanggal 17 Juni 2021	
		Indeks Penerapan Manajemen Resiko *)IKU	Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	- Rapat sosialisasi pelaksanaan MRI tanggal 30 Juni 2021	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW II	Capaian TW II	Keterangan
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring &amp; Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri</li> <li>- Pelaksanaan Penelaahan Sejawat</li> </ul>	Belum dilaksanakan, rencana dilaksanakan di TW III	
		Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu LAKIP</li> <li>- Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3</li> <li>- Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP</li> <li>- Penilaian SAKIP Eselon II</li> <li>- Pra evaluasi SAKIP ITJEN</li> <li>- Penilaian SAKIP Es I Kemenperin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian SAKIP eselon II Kementerian Perindustrian telah selesai dilaksanakan dengan hasil penilaian yang keluar di bulan April, pada lingkungan Inspektorat Jenderal hanya Set Itjen yang mendapatkan predikat A;</li> <li>- Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-A masih berjalan.</li> </ul>	
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Audit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebagai pendukung kegiatan audit rutin dilaksanakan</li> </ul>	
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Informasi Pengawasan</li> <li>- Pengelolaan Media Informasi Pengawasan</li> <li>- Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal</li> <li>- Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi</li> <li>- Penerbitan Majalah Solusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan informasi masih dalam tahap pengembangan</li> <li>- Majalah solusi dalam tahap penyelesaian</li> </ul>	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW II	Capaian TW II	Keterangan
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan</li> <li>- Penyusunan Peta Proses Bisnis Inspektorat Jenderal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa pedoman masih dalam proses penyelesaian;</li> <li>- Penyusunan SK tim penilai Angka Kredit dan tim sekretaris penilaian Angka Kredit;</li> <li>- Pembahasan penanggung jawab area perubahan pada Reformasi Birokrasi</li> </ul>	
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Program Pengawasan</li> <li>- Penyusunan Jakwas</li> <li>- Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal</li> <li>- Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal</li> <li>- Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pengawasan masih berjalan disesuaikan dengan situasi dan kondisi;</li> <li>- Sampai dengan TW II sebagian besar kegiatan masing-masing Inspektorat sesuai dengan PKPT yang telah disusun</li> </ul>	
		Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutakhiran Data dan informasi</li> </ul>		
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berjalan sesuai dengan penugasan SDM sesuai perannya di masing-masing Inspektorat</li> </ul>	
		Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian SAKIP Eselon I</li> <li>- Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan</li> <li>- Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri</li> <li>- Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilaksanakan Penilaian SAKIP eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;</li> <li>- Koordinasi pelaksanaan PMPZI (Persiapan Penilaian Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dari sisi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Pemeriksaan</li> </ul>	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW II	Capaian TW II	Keterangan
				BPK-RI);	
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	- PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	- PKS Penyusunan SKP Tahun 2021 untuk JF Peralihan dan Staff; - PKS Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Auditor; - PKS Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); - PKS Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; - PKS Persamaan Persepsi Pelaksanaan Perjalanan Dinas; - PKS Penilaian Pembangunan Zona Integritas; - PKS Overview Manajemen Risiko Indeks (MRI); - PKS Persamaan Persepsi Penilaian Zona Integritas; - PKS Mekanisme Perpindahan ke Dalam Jabatan Fungsional.	
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor - Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021 - Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	- Tidak dilaksanakan Capacity Building dikarenakan kondisi pandemic; - Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS angkatan 1 dan 2 tahun 2020 - Penilaian dan penetapan angka kredit dalam tahap penyusunan daftar usulan penetapan angka kredit; - Pembahasan penyusunan SKP Tahun 2021 untuk JF Peralihan dan Staff; - Koordinasi terkait SK pensiun atas nama Kusmi Iriyanto; - Melaksanakan koordinasi pegawai yang akan purna tugas 3 tahun kedepan	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW II	Capaian TW II	Keterangan
				untuk mengikuti pelatihan MPP	
		Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik auditor	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan	Telah disediakan informasi tentang hukum yang dapat diakses melalui hukumonline.com serta pencetakan informasi hukum dan referensi pengawasan	
		Layanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Fasilitas Perkantoran</li> <li>- Pembayaran Gaji dan Tunjangan</li> <li>- Honorarium Operasional</li> <li>- Persediaan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Biaya Langganan dan operasional perkantoran</li> <li>- Koordinasi dan layanan pimpinan</li> <li>- Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor</li> <li>- Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan</li> <li>- Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif</li> <li>- Workshop Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat JenderalKetatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Pelayanan Perbendaharaan</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN</li> </ul>	Layanan rutin bulanan	



Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terdapat masih banyak kinerja yang belum menggambarkan pencapaian target kinerja, dikarenakan pengukuran baru dapat dilakukan setelah semua unsur-pengukuran terpenuhi.

Tabel 7 Realisasi kegiatan/output Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	REALISASI	TW II	REALISASI	TW III	REALISASI	TW IV	REALISASI
1	Layanan Perkantoran	1 Layanan	0	0	0	0	-	-	-	-
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	0	0	0	0	-	-	-	-
3	Layanan Sarana Internal	1 Unit	0	0	0	0	-	-	-	-
4	Layanan Pengawasan Internal	2 Laporan	0	0	0	0	-	-	-	-
5	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	13 Laporan	4	4	2	2	-	-	-	-
6	Bantuan Produk	200 Paket	0	0	200	200	-	-	-	-

Sedangkan pencapaian keluaran dan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal secara rinci dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 8 Kegiatan Fisik &amp; Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2021

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Triwulan II			s/d Triwulan II			Sisa Anggaran s/d Triwulan II	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	J u m l a h (Rp)	%
Layanan Perkantoran	22.794.871.000	14,65	6.157.826.730	27.01	36,63	9.834.913.859	43.15	12.959.957.141	56.85
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Intrnal	4.519.854.000	15,13	1.124.838.874	24.89	23,93	1.427.044.871	31.57	3.092.809.129	68.43
Layanan Sarana Internal	590.000.000	-	587.544.980	99.58	-	587.544.980	99.58	2.455.020	0.42
Layanan Pengawasan Internal	557.932.000	9,53	57.056.138	10.23	20,05	70.072.228	12.56	487.859.772	87.44
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	748.600.000	5,34	127.681.303	17.06	40,60	139.605.703	18.65	608.994.297	81.35
Bantuan Produk	600.000.000	-	600.000.000	100.00	-	600.000.000	100.00	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29.811.257.000</b>	<b>14,09</b>	<b>8.654.948.025</b>	<b>29.03</b>	<b>33,71</b>	<b>12.659.181.641</b>	<b>42.46</b>	<b>17.152.075.359</b>	<b>57.54</b>

### **C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada triwulan II sebagian besar telah berjalan sesuai dengan rencana namun belum semua dapat menghasilkan output (keluaran) yang dapat diukur karena pada triwulan ini merupakan tahapan persiapan dan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang harus diselesaikan. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu :

1. Adanya perubahan struktur organisasi yang mulai diberlakukan di Triwulan II mengakibatkan kurang optimalnya pendelegasian tanggung jawab, pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan;
2. Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai rencana karena adanya revisi kegiatan dan anggaran.

### **D. Langkah Tindak Lanjut**

Upaya dan langkah tindak lanjut untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melaksanakan hal sebagai berikut :

1. Masing-masing penanggung jawab kegiatan/koordinator kegiatan agar mengatur perencanaan kegiatan;
2. Koordinator kegiatan agar segera melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan *timeline* yang telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan pelaksanaan antar kegiatan;
3. Seluruh pegawai Inspektorat Jenderal agar memaksimalkan kebijakan *work from home* dengan mengerjakan tugas yang dapat dilakukan secara daring;
4. Agar meningkatkan koordinasi antara Inspektorat dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga kinerja pengawasan dan dukungannya berjalan dengan baik;
5. Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, agar penanggung jawab kegiatan pada masing-

masing unit eselon II menyusun laporan kegiatan dengan tembusan kepada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

## **BAB IV. PENUTUP**

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan II Tahun 2021 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Pada Triwulan II capaian fisik mencapai 14,09% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp8.654.948.025,- atau 29,03% dari pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar Rp29.811.257.000,-.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran belum sepenuhnya dapat dicapai karena pada triwulan ini merupakan masih ada beberapa kegiatan dalam tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan di Triwulan berikutnya, akan dilaksanakan penjadwalan ulang dengan perbaikan tahapan serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar kegiatan dapat berjalan dengan maksimal.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal periode Triwulan II Tahun 2021, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

# LAMPIRAN

Rencana Aksi Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut</li> </ul>	91,5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut</li> <li>- Temu Teknis penyuluhan/p emutakhiran Data Tindak Lanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut</li> <li>- Temu Teknis penyuluhan/p emutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut</li> <li>- Temu Teknis penyuluhan/p emutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal</li> </ul>	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan</li> </ul>	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan</li> </ul>	Sekretaris Inspektorat Jenderal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL	8%	- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL	- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL	- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL	- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis
		Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	1,4%	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB area penguatan pengawasan *)IKU	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	71%	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	- Forum komunikasi PMPRB - Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian	- Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian - Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Indeks Penerapan Manajemen Resiko *)IKU	Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	Level 3	-	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Program dan Keuangan
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal -Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri -Pelaksanaan Penelaahan Sejawat	75%	-	-	- Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat	- Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Program dan Keuangan
		Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *)IKU	-Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN -Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 -Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra - Penyusunan / Penyempurnaan	IACM Level 3	- Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra	- Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN -Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Penilaian SAKIP Eselon	- Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Reviu Perkin dan Renstra - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	- Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP -Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan - Pra evaluasi SAKIP ITJEN			II -Pra evaluasi SAKIP ITJEN				
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	77%	- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Umum
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	- Pengembangan Informasi Pengawasan -Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal -Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi -Penerbitan Majalah Solusi	25%	- Pengembangan Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Penerbitan Majalah Solusi	- Pengembangan Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal - Penerbitan Majalah Solusi	- Pengembangan Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal - Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi - Penerbitan Majalah Solusi	- Pengembangan Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal - Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi - Penerbitan Majalah Solusi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Umum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan - Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	55%	- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan	- Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan - Penyusunan Peta Proses Bisnis Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan - Penyusunan Peta Proses Bisnis Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	- Koordinasi Program Pengawasan - Penyusunan Jakwas - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian	80%	- Koordinasi Program Pengawasan - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	- Koordinasi Program Pengawasan - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	- Koordinasi Program Pengawasan - Penyusunan Jakwas - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian	- Koordinasi Program Pengawasan - Penyusunan Jakwas - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Program dan Keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			-Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan -Reviu RKA-KL				Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan -Reviu RKA-KL		
		Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	- Pemutakhiran Data dan Informasi	90%	- Pemutakhiran Data dan Informasi	- Pemutakhiran Data dan Informasi	- Pemutakhiran Data dan Informasi	- Pemutakhiran Data dan Informasi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	90%	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian
		Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil	91%	-Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang	- Penilaian SAKIP Eselon I - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik - Penyusunan Laporan APIP		industri - Penyusunan Laporan APIP	terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik	Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik - Penyusunan Laporan APIP	Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik		
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan		60%	PKS	PKS	PKS	PKS		Koordinator Kepegawaian
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	75%	- Koordinasi Pengembangan SDM - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal - Koordinasi	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor - Evaluasi	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021 - Fasilitasi Bebas	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			Penyusunan SKP 2021 -Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian			Pembinaan Kepegawaian	Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021 -Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian		
		Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik auditor	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan	92%	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan -Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik Auditor	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan -Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik Auditor	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian
		Layanan Perkantoran	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional -Persediaan dan Perlengkapan Kantor -Biaya Langganan	12 Layanan	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional - Persediaan dan Perlengkapan	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional - Persediaan dan Perlengkapan	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional -Persediaan dan Perlengkapan Kantor	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional -Persediaan dan Perlengkapan Kantor	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian Program dan Keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			<p>dan operasional perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan layanan pimpinan</li> <li>- Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor</li> <li>-Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan</li> <li>-Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif</li> <li>-Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal</li> <li>-Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Pelayanan Perbendaharaan</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN</li> <li>- Penyusunan Laporan Keuangan dan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor</li> <li>- Biaya Langganan dan operasional perkantoran</li> <li>- Koordinasi dan layanan pimpinan</li> <li>- Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor</li> <li>- Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan</li> <li>- Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif</li> <li>- Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor</li> <li>- Biaya Langganan dan operasional perkantoran</li> <li>- Koordinasi dan layanan pimpinan</li> <li>- Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor</li> <li>- Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan</li> <li>- Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif</li> <li>- Workshop Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Biaya Langganan dan operasional perkantoran</li> <li>- Koordinasi dan layanan pimpinan</li> <li>- Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor</li> <li>-Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan</li> <li>-Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif</li> <li>- Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>-Pelayanan Perbendaharaan</li> <li>-Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan</li> </ul>			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			BMN -Penyusunan RK-BMN		Perindustrian - Pelayanan Perbendaharaan - Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN	Kearsipan Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Pelayanan Perbendaharaan - Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN	BMN -Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN	BMN -Penyusunan RK-BMN		



**LAMPIRAN FORM A**



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL  
(Aplikasi Form A)  
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021  
(Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 )**

**FORMULIR A**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021  
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

**I. DATA UMUM**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi        | : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN                 |
| 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi                 | : 04. Ekonomi   |
| 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi             | : 04.07. Industri Dan Konstruksi  |
| 4. Nomor Kode dan Nama Program                | : 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen                                    |
| 5. Indikator Hasil                            | : 6036 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal |
| 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan               | : 1/1   |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke | : Ir. Liliek Widodo, MSi  |
| 8. Penanggung Jawab Kegiatan                  | : JI. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 4                            |
| 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan | : SP DIPA- 019.06.1.247885/2021   |
| 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA               |   |

**II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN**

1 Nomor Kode dan Nama Output	2 No. Loan	3 Anggaran (Rp.000)		5 Total	6 Indikator Keluaran (Output)	7 Satuan (Unit)
		PHLN	Rupiah			
EAA Layanan Perkantoran	-	-	22,794,871	22,794,871	1 Layanan	1 Layanan
EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	-	-	4,519,854	4,519,854	1 Layanan	1 unit
EAD Layanan Sarana Internal	-	-	590,000	590,000	2 Laporan	2 Laporan
EAK Layanan Pengawasan Internal	-	-	557,932	557,932	13 Laporan	13 Laporan
EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	-	748,600	748,600		
<b>Total</b>	-	-	<b>29,211,257</b>	<b>29,211,257</b>		



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Liliek Widodo  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Masrokhan  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Jakarta, 2021**

**Inspektur Jenderal**



**Masrokhan**

**Sekretaris Inspektorat Jenderal**



**Liliek Widodo**

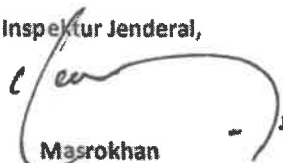
**PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>			
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal	2 laporan
		Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	4 laporan
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%
		Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	4 laporan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71%
		Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	1 kegiatan
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal * IKU	Level 3 IACM
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>			
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Ketersediaan Sistem Informasi Pengawasan untuk audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	25%
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55%
		Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	80%
		Ketersediaan data dan informasi pengawasan yang memadai	90%
		Komponen Pengungkit Penerapan Reformasi Birokrasi di unit Inspektorat Jenderal	91%
5	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%
		Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	75%
		Kepatuhan terhadap kode etik auditor dalam menjalankan tugas pengawasan	92%
		Terselenggaranya layanan perkantoran Inspektorat Jenderal	12 Bulan Layanan

KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal</b>	<b>Rp32,643,630,000</b>
- Layanan Perkantoran	Rp25,107,244,000
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Rp5,593,596,000
- Layanan Sarana Internal	Rp590,000,000
- Layanan Pengawasan Internal	Rp568,290,000
- Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Rp784,500,000

**Total Anggaran Tahun 2021 : Rp32,643,630,000**  
(Tiga puluh dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Inspektur Jenderal,

  
Masrokhan

Jakarta, 2021  
Sekretaris Inspektorat Jenderal

  
Liliek Widodo



Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

Pilih Unit Kerja

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real Fisik	Real Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
<b>1. Terwujudnya keefektifan dan keefisienan program kerja unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian</b>													
	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi *) IKU Pagu = Rp 260.660.000	91,5 persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%	4%	90 persen
	Pengaduan masyarakat berkadat pengawasan yang ditindaklanjuti Pagu = Rp. 171.782.000	85 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%	39%	90 Persen
	Makamum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti Pagu = Rp. 150.000.000	8 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%	0 Persen
	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *) IKU Pagu = Rp 199.780.000	1,4 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	16%	0 Persen
Total Pagu Sasaran = Rp. 782.222.000													
<b>2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>													
	Nilai RB area penguatan pengawasan Pagu = Rp 464.866.000	71 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	3 Persen
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko Kemenerin *) IKU Pagu = Rp 499.928.000	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0 Level
Total Pagu Sasaran = Rp. 958.794.000													
<b>3. Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif</b>													
	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan Pagu = Rp. 880.000	75 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1 Persen
	Capaian IACM IJen *) IKU Pagu = Rp. 1.870.850.000	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	3%	1 Level
	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer) Pagu = Rp 590.000.000	77 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
Total Pagu Sasaran = Rp. 2.461.730.000													
<b>4. Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>													
	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor Pagu = Rp 44.160.000	25 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	15%	1 Persen
	Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku Pagu = Rp 76.300.000	55 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0 Persen
	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan PKPT Pagu = Rp 213.040.000	80 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	13%	0 Persen
	Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai Pagu = Rp. 11.036.000	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0 Persen
	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya Pagu = Rp 27.400.000	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
	Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB IJen Pagu = Rp. 16.050.000	91 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
Total Pagu Sasaran = Rp. 387.986.000													
<b>5. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas</b>													
	Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat Pagu = Rp 13.000.000	75 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
	Sharing Knowledge atas ketersediaan diklat substansi pengawasan Pagu = Rp 68.200.000	60 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%	21%	0 Persen
	Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor Pagu = Rp 26.000.000	92 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
	Layanan Perkantoran Pagu = Rp 26.806.598.000	12 Layanan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%	33%	0 Layanan
Total Pagu Sasaran = Rp. 26.913.798.000													